

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Telah terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran, namun tingkat kepatuhan ini masih perlu untuk ditingkatkan karena target penerimaan lunas PBB-P2 belum tercapai. Secara umum intensifikasi pemungutan PBB di Kecamatan Karimunjawa sudah berjalan dengan cukup baik, atau dengan kata lain Intensifikasi Pemungutan PBB berjalan dengan cukup efektif karena setiap tahunnya terjadi peningkatan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Peningkatan penerimaan pajak merupakan salah satu indikasi terjadinya peningkatan kesadaran wajib pajak.
2. Sistematis/alur pelayanan fiskus wajib pajak PBB-P2 pada kecamatan Karimunjawa diawali dengan pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, penghitungan pajak dan pembayaran pajak telah dilaksanakan dengan baik oleh aparat pajak yang menangani.
3. Hambatan dalam pemungutan penerimaan lunas PBB-P2 di kecamatan Karimunjawa dapat disimpulkan karena terdapat wajib pajak yang berdomisili diluar kecamatan Karimunjawa sehingga mengalami kendala dalam penagihan maupun penyampaian surat teguran sehingga menunggak pembayarannya.
4. Keterlambatan penerimaan lunas PBB-P2 disebabkan sebagian besar mata pencaharian masyarakat Karimunjawa adalah petani yang

penghasilannya tidak pasti. Sehingga hal ini menjadi faktor keterlambatan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Selain itu kurangnya kesadaran warga akan pentingnya pajak bagi pembangunan negara.

## 5.2 Saran

Dari hasil penelitian Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karimunjawa, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kecamatan Karimunjawa perlu melakukan penelusuran terhadap wajib pajak dari luar kota yang menunggak membayar pajak. Mengenai domisili dan alamat penagihan yang benar sehingga surat teguran atau penagihan bisa sampai kepada wajib pajak.
2. Peningkatan Penyuluhan/Sosialisasi agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya pembayaran PBB-P2 secara tepat waktu. Sekaligus sosialisasi pembayaran PBB secara online. Dengan sistem online, dimanapun wajib pajak berada dapat mengetahui jumlah tagihan dan dapat membayarnya.
3. Karena semua tahapan kebijakan pemungutan PBB oleh daerah memerlukan dukungan kualitas SDM, maka *transfer knowledge* perlu dilakukan terhadap apatur pemungut pajak di tingkat desa, mengingat pendidikan formalnya memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Adapun pelatihan SDM komprehensif yang dibutuhkan meliputi penilaian, juru sita, dan pengolahan data dengan materi yang dipadatkan dengan biaya yang dapat dijangkau anggaran pemerintah setempat.